

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Sektor pertanian tetap menjadi sektor strategis di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia sebagai penyedia pangan, sumber pendapatan rumah tangga pedesaan, dan pilar stabilitas sosial-ekonomi. Sektor pertanian memiliki peran yang multifungsi, tidak hanya dalam aspek produksi pangan, tetapi juga dalam peningkatan kesejahteraan petani, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan lingkungan hidup. Dalam konteks pembangunan suatu wilayah, pertanian dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan, dan menjadi motor penggerak ekonomi pedesaan melalui agribisnis dan agroindustry (Yamani & Nasution, 2024).

Fenomena sektor pertanian saat ini adalah semakin menurunnya jumlah petani di Indonesia yang dapat berdampak pada krisis petani. Hal tersebut dapat dilihat semakin banyak petani yang berusia tua dan sedikitnya generasi muda yang mau menggantikan generasi tua untuk bekerja di sektor pertanian (Arvianti et al., 2019) dalam penelitian (Noor & Suwandana, 2024). Strategi yang ditujukan kepada orang tua dan generasi muda petani diperlukan untuk mendorong regenerasi petani dan memodernisasi pertanian. Oleh karena itu, Fenomena ini memerlukan analisis kuantitatif yang mampu menjelaskan bagaimana variabel Luas Lahan Pertanian, Nilai Tukar Petani, Upah Buruh Tani, dan Investasi Sektor Pertanian telah mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian dalam dekade terakhir.

Di Indonesia pada periode 2008-2023, terdapat konflik antara tujuan kebijakan: di satu sisi, pemerintah dan sektor swasta mendorong investasi untuk meningkatkan produktivitas dan infrastruktur; di sisi lain, konversi lahan dan mekanisasi berisiko mengurangi peluang kerja bagi pekerja berkeahlian rendah. Masalah utama yang muncul adalah: apakah perluasan atau pengurangan lahan masih menjadi faktor utama yang menentukan penyerapan tenaga kerja; sejauh mana nilai tukar petani mempengaruhi keputusan para petani untuk tetap berada di sektor pertanian; apakah upah buruh tani mempengaruhi sikap para petani untuk tetap bekerja di sektor pertanian dan apakah investasi yang terjadi bersifat padat karya atau padat modal.

Berdasarkan publikasi Hasil Sensus Pertanian Tahun 2023 Tahap I, jumlah Usaha Pertanian Perorangan (UTP) pada tahun 2023 berjumlah 29,34 juta usaha (BPS, 2023). Jumlah tersebut mengalami penurunan dari data tahun 2013 yang berjumlah 31,70 juta usaha. Terjadi penurunan sebanyak 2,36 juta atau 7,45% usaha (BPS, 2013) dalam (Noor & Suwandana, 2024) Penurunan usaha pertanian perorangan ini salah satu penyebabnya dimungkinkan karena petani usia tua (usia >55 tahun) pada tahun 2013 cukup dominan dan kemungkinan setelah 10 tahun berlalu mereka sudah tidak berusaha lagi di sektor pertanian (BPS, 2013) dalam (Noor & Suwandana, 2024).

Implikasi keberlanjutan lahan pertanian, investasi di sektor pertanian, dan mekanisme penyerapan tenaga kerja semakin menjadi isu mendesak, sejalan dengan perubahan demografi petani, penurunan luas lahan produktif, dan perubahan struktur tenaga kerja. Di Indonesia, pertanian menghadapi tantangan

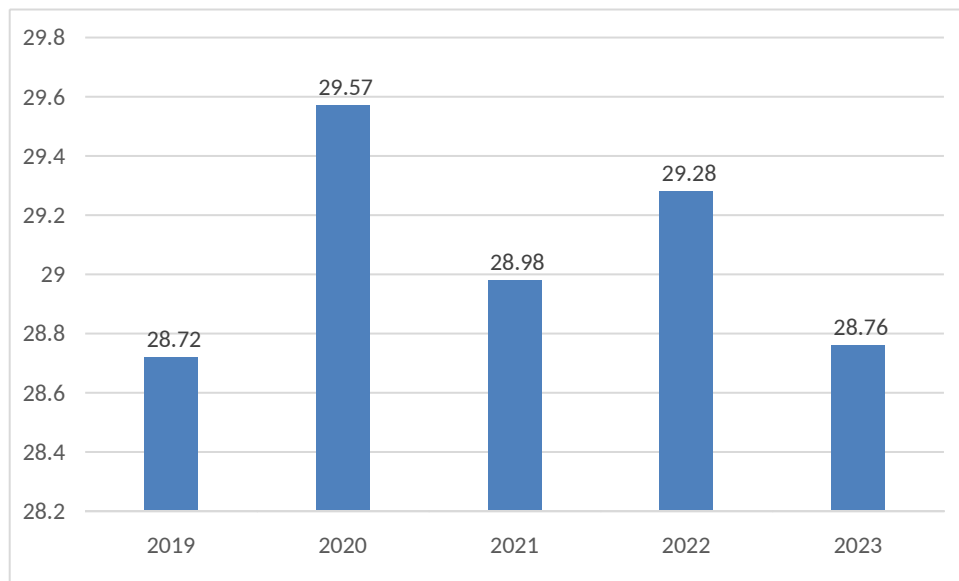
seperti perubahan iklim, tekanan populasi, dan kebutuhan akan efisiensi produksi yang semakin meningkat. Menurut Teori Lewis (1954) menjelaskan bahwa sektor pertanian tradisional di negara berkembang biasanya memiliki kelebihan tenaga kerja, yaitu jumlah tenaga kerja jauh melebihi kebutuhan produksi.

Kesenjangan penelitian yang dapat diidentifikasi dari tinjauan di atas meliputi: pertama, sedikit penelitian yang secara kuantitatif menganalisis hubungan simultan antara luas lahan pertanian, nilai tukar petani, upah buruh tani dan investasi sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian dalam periode panjang seperti 2008-2023 di Indonesia. Kedua, banyak studi membahas setiap variabel secara terpisah misalnya, penelitian oleh Andriyani & Aznuriliana (2022) hanya berfokus pada luas lahan, penelitian Kurniawan (2022) hanya berfokus pada nilai tukar petani, penelitian Mulyani (2017) hanya berfokus pada investasi dan penelitian Sakdiyah & Taufiq (2023) hanya berfokus pada luas lahan, upah buruh tani dan nilai tukar petani. sehingga gagal menggambarkan interaksi antara variabel-variabel tersebut. Ketiga, terdapat kekurangan analisis empiris yang memanfaatkan data nasional dan jangka menengah (15 tahun) yang menghubungkan variabel-variabel ini dalam satu model empiris untuk sektor pertanian di Indonesia. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji pengaruh luas lahan, nilai tukar petani, dan investasi sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian akan mengisi celah ini.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena: sektor pertanian tetap menjadi penyedia utama lapangan kerja bagi tenaga kerja nasional dan memainkan peran strategis dalam ketahanan pangan nasional dan perekonomian. Namun, tren

seperti berkurangnya produktivitas dalam mengelola lahan pertanian, populasi petani yang menua dan menyusut, serta investasi sektor pertanian yang kurang optimal dalam penciptaan lapangan kerja menunjukkan bahwa *status quo* tidak dapat dibiarkan berlanjut tanpa intervensi berbasis bukti.

Dengan menganalisis dampak luas lahan pertanian, nilai tukar petani, upah buruh tani, dan investasi sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia tahun 2008-2023, penelitian ini akan memberikan kontribusi empiris yang penting bagi kebijakan pengembangan pertanian, penciptaan lapangan kerja, dan investasi sektor pertanian. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar untuk rekomendasi kebijakan guna meningkatkan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian melalui optimalisasi lahan, peningkatan nilai tukar petani, upah buruh tani, dan pengaturan investasi sektor pertanian yang ditargetkan. Berikut merupakan data perbandingan Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Luas Lahan Pertanian, Nilai Tukar Petani, Upah Buruh Tani, dan Investasi Sektor Pertanian:



Sumber: *World Bank*

Gambar 1.1 Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian (Persen)

Berdasarkan data penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia periode 2008-2023, terlihat bahwa terjadi pergeseran struktur ketenagakerjaan antara sektor pertanian dan sektor jasa. Menurut Ade Jamal (2018) dalam penelitian Nooralam et al. (2018), Penyerapan tenaga kerja adalah banyaknya lapangan pekerjaan yang sudah terisi oleh banyaknya jumlah penduduk yang bekerja pada suatu sektor. Sedangkan Sektor pertanian merupakan suatu kegiatan usaha manusia dimana didalamnya meliputi kegiatan bertanam, perikanan, peternakan, dan kehutanan. Sebagian besar pekerjaan masyarakat di Indonesia adalah sebagai petani (Rahman, 2016) dalam penelitian (Nooralam et al., 2018).

Pada tahun 2008, tenaga kerja sektor pertanian masih mencapai sekitar 41,01% dari total tenaga kerja, sedangkan sektor jasa berada pada angka 41,02%. Kondisi ini menunjukkan bahwa kedua sektor memiliki kontribusi yang hampir seimbang terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Pada periode tersebut,

perekonomian Indonesia masih ditopang oleh sektor primer, terutama pertanian, yang menjadi sumber mata pencaharian utama masyarakat pedesaan. Namun, seiring berkembangnya pembangunan ekonomi dan urbanisasi, sektor jasa mulai menunjukkan peran yang semakin dominan dalam menyerap tenaga kerja.

Memasuki periode 2009-2013, tenaga kerja sektor pertanian mengalami penurunan dari 40,45% menjadi 34,97%, sedangkan tenaga kerja sektor jasa meningkat dari 42,00% menjadi 44,24%. Fenomena ini terjadi sejalan dengan pertumbuhan sektor perdagangan, transportasi, komunikasi, serta jasa keuangan yang berkembang pesat pasca krisis keuangan global 2008. Pada saat yang sama, proses urbanisasi mendorong perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota untuk memperoleh pekerjaan yang dianggap lebih menjanjikan dari segi pendapatan dan kondisi kerja. Akibatnya, sektor jasa menjadi tujuan utama bagi tenaga kerja yang keluar dari sektor pertanian.

Pada periode 2014-2016, penurunan tenaga kerja sektor pertanian terus berlanjut dari 34,28% menjadi 31,82%, sementara sektor jasa meningkat dari 44,49% menjadi 46,63%. Kondisi ini tidak terlepas dari transformasi struktural ekonomi Indonesia yang semakin mengarah pada sektor tersier. Pertumbuhan pusat perbelanjaan, industri pariwisata, jasa transportasi berbasis teknologi, dan perkembangan ekonomi digital mulai membuka banyak peluang kerja baru. Selain itu, peningkatan penggunaan teknologi dan mekanisasi dalam sektor pertanian menyebabkan kebutuhan tenaga kerja di sektor tersebut menjadi relatif lebih rendah dibandingkan sebelumnya.

Pada tahun 2017-2019, tenaga kerja sektor pertanian kembali menurun dari 30,79% menjadi 28,72%, sedangkan sektor jasa meningkat dari 47,35% menjadi 49,13%. Periode ini ditandai dengan pesatnya perkembangan ekonomi digital di Indonesia, ditunjukkan oleh munculnya berbagai platform e-commerce, transportasi online, dan layanan berbasis aplikasi yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Di sisi lain, generasi muda cenderung kurang tertarik bekerja di sektor pertanian karena menganggap pekerjaan di sektor jasa lebih modern, memiliki prospek karier yang lebih baik, dan menawarkan pendapatan yang lebih tinggi.

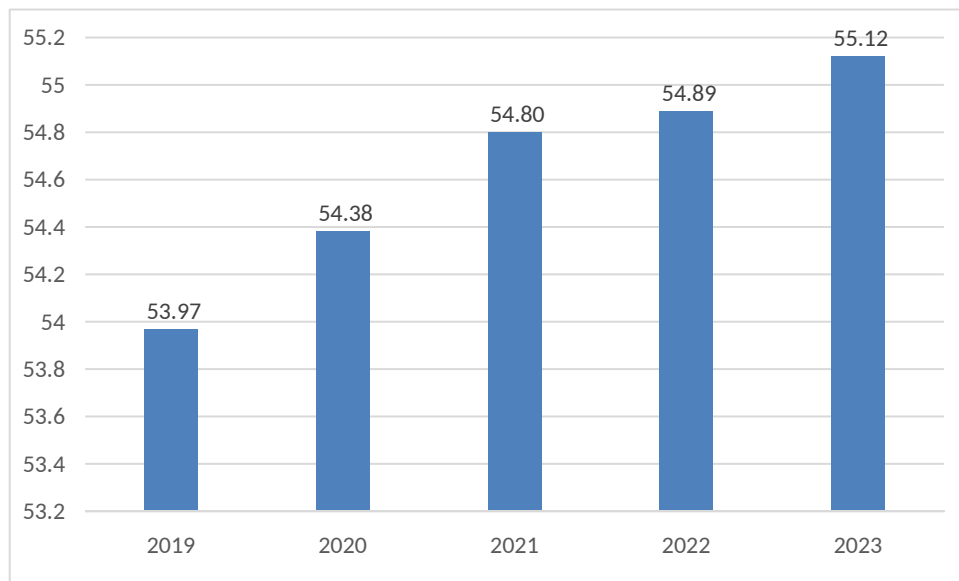
Pada tahun 2020, terjadi fenomena yang berbeda akibat pandemi COVID-19. Meskipun sektor jasa masih mendominasi dengan proporsi 49,05%, angka tersebut sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 49,13%. Sementara itu, tenaga kerja sektor pertanian meningkat dari 28,72% menjadi 29,57%. Kondisi ini terjadi karena banyak pekerja sektor jasa, terutama pada bidang pariwisata, perhotelan, transportasi, dan perdagangan, kehilangan pekerjaan akibat pembatasan aktivitas ekonomi. Sebagian tenaga kerja kemudian kembali ke daerah asal dan bekerja di sektor pertanian yang berfungsi sebagai sektor penyangga (*safety net*) ketika terjadi krisis ekonomi.

Setelah pandemi mulai terkendali pada tahun 2021-2022, sektor jasa kembali menunjukkan peningkatan dari 49,25% menjadi 48,84%, sedangkan sektor pertanian berada pada kisaran 28,98% hingga 29,28%. Pemulihan aktivitas ekonomi, meningkatnya konsumsi masyarakat, dan percepatan transformasi digital mendorong kembali pertumbuhan sektor jasa. Meskipun demikian, sektor pertanian

tetap mempertahankan perannya sebagai penyedia lapangan kerja penting, terutama di wilayah pedesaan. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih memiliki fungsi strategis dalam menjaga stabilitas ketenagakerjaan nasional.

Pada tahun 2023, tenaga kerja sektor pertanian tercatat sebesar 28,76%, sedangkan sektor jasa mencapai 49,26%. Jika dibandingkan dengan tahun 2008, proporsi tenaga kerja sektor pertanian telah menurun sekitar 12,25 poin persentase, sementara sektor jasa meningkat sekitar 8,24 poin persentase. Data tersebut mengindikasikan adanya transformasi struktural perekonomian Indonesia dari sektor primer menuju sektor tersier. Perubahan ini mencerminkan peningkatan tingkat pembangunan ekonomi, urbanisasi, kemajuan teknologi, serta berkembangnya berbagai aktivitas jasa yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Oleh karena itu minat generasi muda terhadap sektor pertanian semakin berkurang, hal ini disebabkan karena pendapatan petani yang tidak stabil sehingga menyebabkan penurunan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian. Sementara itu, sektor jasa berkembang pesat sebagai sektor yang lebih fleksibel dan mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Namun demikian, sektor pertanian tetap memiliki peran penting sebagai penyedia lapangan kerja dan penopang ketahanan ekonomi, terutama ketika terjadi guncangan ekonomi seperti pandemi COVID-19.



Sumber: *World Bank*

Gambar 1.2 Luas Lahan Pertanian (Hektar)

Berdasarkan data periode 2008-2023, terlihat bahwa perkembangan luas lahan pertanian mengalami dinamika yang cukup beragam. Pada periode 2008-2013, luas lahan pertanian cenderung mengalami penurunan secara bertahap dari 40,03 juta hektar pada tahun 2008 menjadi 39,25 juta hektar pada tahun 2013. Penurunan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, industri, dan infrastruktur sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi yang semakin pesat. Selain itu, urbanisasi yang terus meningkat menyebabkan tekanan terhadap keberadaan lahan pertanian, khususnya di wilayah Pulau Jawa yang menjadi pusat kegiatan ekonomi nasional.

Pada tahun 2014, luas lahan pertanian kembali mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 36,91 juta hektar. Kondisi ini berkaitan dengan semakin masifnya pembangunan infrastruktur nasional, seperti jalan tol, kawasan industri,

dan perluasan wilayah perkotaan yang membutuhkan lahan dalam jumlah besar. Di sisi lain, rendahnya keuntungan usaha tani pada beberapa komoditas menyebabkan sebagian petani menjual atau mengalihkan fungsi lahan mereka untuk kegiatan nonpertanian yang dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi.

Memasuki tahun 2015, luas lahan pertanian meningkat menjadi 37,48 juta hektar. Kenaikan ini dapat dikaitkan dengan berbagai program pemerintah yang mulai memperkuat sektor pertanian sebagai upaya menjaga ketahanan pangan nasional. Pada periode tersebut, pemerintah mendorong optimalisasi lahan pertanian, pencetakan sawah baru di beberapa daerah, serta peningkatan investasi pada sektor pertanian. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor pangan dan meningkatkan kapasitas produksi domestik.

Namun, pada tahun 2016 luas lahan pertanian kembali menurun menjadi 36,74 juta hektar sebelum meningkat sedikit menjadi 37,28 juta hektar pada tahun 2017. Fluktuasi ini menunjukkan bahwa upaya perluasan lahan pertanian masih menghadapi berbagai tantangan, seperti tingginya laju konversi lahan, konflik penggunaan lahan, serta keterbatasan lahan potensial yang dapat dikembangkan. Selain itu, perubahan iklim dan bencana alam di beberapa wilayah juga turut memengaruhi pemanfaatan lahan pertanian secara optimal.

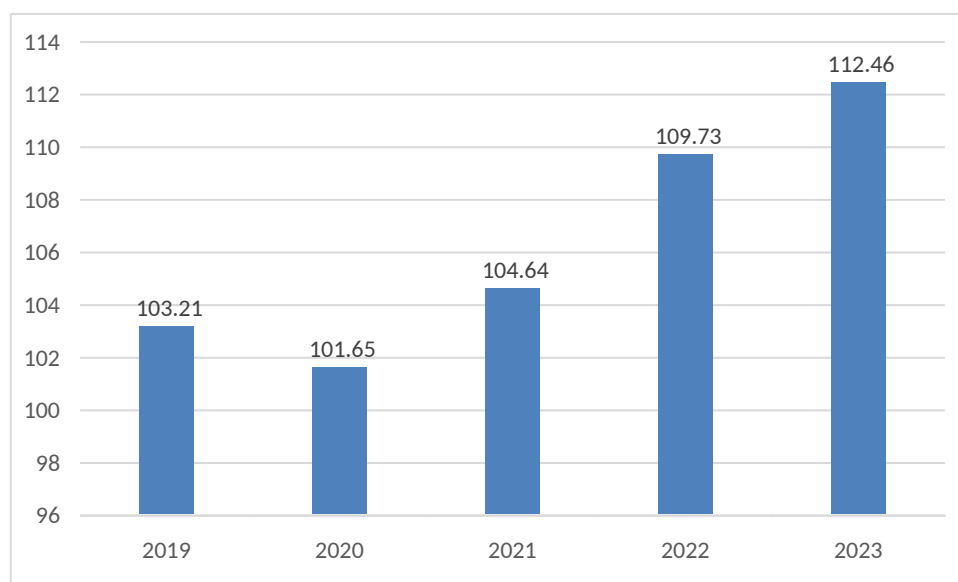
Pada tahun 2018, luas lahan pertanian kembali turun menjadi 34,83 juta hektar, yang merupakan angka terendah selama periode pengamatan sebelum tahun 2019. Penurunan ini mencerminkan masih kuatnya tekanan pembangunan nonpertanian terhadap ketersediaan lahan pertanian. Pertumbuhan sektor industri,

properti, dan pembangunan infrastruktur yang terus berlanjut menyebabkan banyak lahan produktif beralih fungsi. Fenomena ini menjadi perhatian pemerintah karena dapat mengancam keberlanjutan produksi pangan dan penyerapan tenaga kerja di sektor pertanian.

Perubahan yang cukup mencolok terjadi pada tahun 2019 ketika luas lahan pertanian meningkat tajam menjadi 53,97 juta hektar dan terus meningkat hingga mencapai 55,12 juta hektar pada tahun 2023. Lonjakan tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan penambahan lahan pertanian secara fisik dalam jumlah besar, tetapi juga dipengaruhi oleh perubahan metodologi pendataan dan pemutakhiran data pertanian yang dilakukan oleh pemerintah melalui pemanfaatan teknologi penginderaan jauh, citra satelit, serta penyempurnaan sistem informasi geospasial. Dengan metode pendataan yang lebih akurat, cakupan lahan pertanian yang sebelumnya belum teridentifikasi dapat tercatat secara lebih lengkap.

Pada periode 2020-2023, luas lahan pertanian menunjukkan tren peningkatan yang relatif stabil dari 54,38 juta hektar menjadi 55,12 juta hektar. Kondisi ini didorong oleh meningkatnya perhatian pemerintah terhadap ketahanan pangan nasional, terutama setelah pandemi COVID-19 yang menunjukkan pentingnya sektor pertanian sebagai penopang ekonomi dan penyedia kebutuhan pangan masyarakat. Berbagai program seperti perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), pengembangan food estate, serta optimalisasi lahan pertanian menjadi faktor yang mendukung terjaganya luas lahan pertanian di Indonesia.

Secara keseluruhan, perkembangan luas lahan pertanian selama periode 2008-2023 menunjukkan bahwa sektor pertanian menghadapi tantangan alih fungsi lahan yang cukup besar, namun tetap menjadi sektor strategis yang terus diperkuat untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi nasional. Menurut Yimam et al. (2022), menemukan bahwa perubahan penggunaan lahan secara signifikan memengaruhi kondisi sosial-ekonomi rumah tangga di wilayah pedesaan. Transformasi lahan pertanian menjadi permukiman, infrastruktur, maupun penggunaan non-pertanian lainnya terbukti menyebabkan penurunan luas lahan garapan petani, yang berdampak pada berkurangnya pendapatan dari sektor pertanian. Dinamika ini dipengaruhi oleh interaksi antara kebijakan ketahanan pangan, perlindungan lahan pertanian, tekanan alih fungsi lahan, serta kebutuhan pembangunan non-pertanian.



Sumber: *Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian*

Gambar 1.3 Nilai Tukar Petani

Berdasarkan data periode 2008-2023, terlihat bahwa NTP mengalami fluktuasi namun secara umum menunjukkan tren meningkat dalam jangka panjang. NTP merupakan indikator yang mencerminkan tingkat kesejahteraan petani, di mana Jika NTP lebih dari 100, hal ini mengindikasikan bahwa petani menghasilkan lebih banyak uang daripada yang mereka keluarkan. Jika NTP kurang dari 100, hal ini mengindikasikan bahwa petani tidak menghasilkan uang sebanyak yang mereka bayarkan (Ramadhanu et al., 2020) dalam penelitian (Juswadi & Sumarna, 2024).

Pada tahun 2008, NTP tercatat sebesar 100,15 dan sedikit menurun menjadi 99,86 pada tahun 2009. Penurunan ini berkaitan dengan dampak krisis keuangan global tahun 2008 yang memengaruhi aktivitas ekonomi dan harga komoditas pertanian. Meskipun sektor pertanian relatif lebih tahan terhadap krisis dibandingkan sektor lainnya, pelemahan permintaan pasar menyebabkan pertumbuhan harga hasil pertanian tidak sebanding dengan peningkatan biaya produksi yang harus ditanggung petani.

Pada periode 2010-2012, NTP mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari 101,78 menjadi 105,24. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat harga yang diterima petani meningkat lebih cepat dibandingkan harga barang dan jasa yang dibayar petani. Kenaikan tersebut didorong oleh membaiknya harga berbagai komoditas pertanian di pasar domestik maupun internasional, seperti kelapa sawit, karet, dan beberapa komoditas pangan strategis. Selain itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang relatif stabil pada periode tersebut turut meningkatkan permintaan terhadap hasil pertanian sehingga berdampak positif terhadap pendapatan petani.

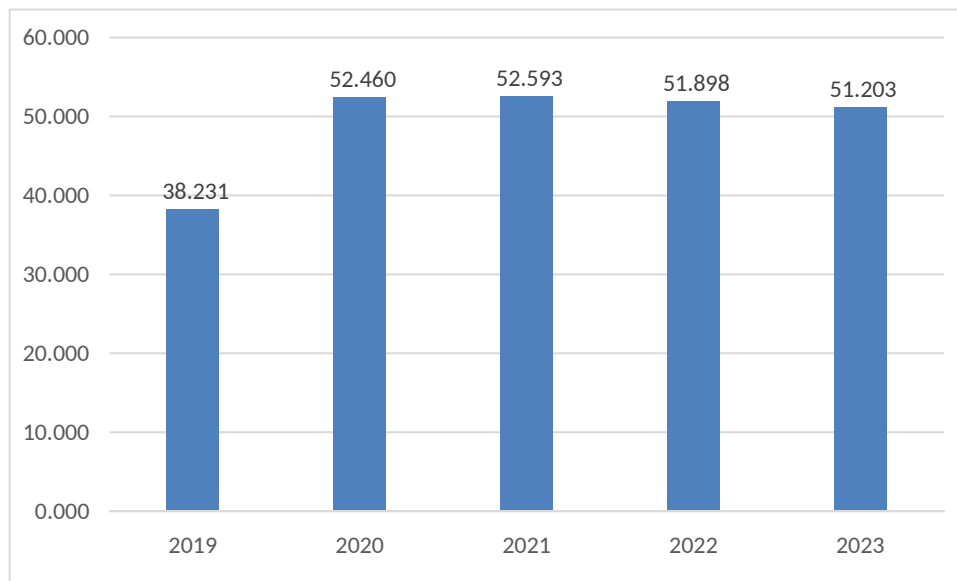
Pada tahun 2013, NTP sedikit menurun menjadi 104,95. Penurunan ini terjadi seiring dengan meningkatnya inflasi nasional akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang dilakukan pemerintah. Kenaikan harga BBM menyebabkan biaya produksi dan distribusi hasil pertanian meningkat, sehingga mengurangi daya beli petani. Meskipun demikian, nilai NTP yang masih berada di atas angka 100 menunjukkan bahwa secara umum petani masih memperoleh surplus dari kegiatan usahatani.

Selama periode 2014-2017, NTP cenderung mengalami penurunan dan berada pada kisaran 101-102. Pada tahun 2014 NTP tercatat sebesar 102,03, kemudian turun menjadi 101,60 pada tahun 2015, sedikit naik menjadi 101,65 pada tahun 2016, dan kembali turun menjadi 101,28 pada tahun 2017. Kondisi ini dipengaruhi oleh perlambatan ekonomi global yang menyebabkan harga beberapa komoditas ekspor pertanian mengalami penurunan. Selain itu, tingginya biaya produksi seperti pupuk, benih, dan upah tenaga kerja turut menekan keuntungan yang diperoleh petani. Akibatnya, peningkatan pendapatan petani tidak mampu tumbuh secara optimal.

Pada tahun 2018 dan 2019, NTP kembali menunjukkan perbaikan menjadi 102,46 dan 103,21. Peningkatan ini berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintah dalam mendukung sektor pertanian, seperti peningkatan subsidi pupuk, pembangunan infrastruktur pertanian, perbaikan sistem irigasi, dan program bantuan sarana produksi kepada petani. Kebijakan tersebut membantu menekan biaya produksi dan meningkatkan produktivitas usaha tani sehingga pendapatan petani mengalami perbaikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Pada tahun 2020, NTP kembali menurun menjadi 101,65 akibat pandemi COVID-19 yang mengganggu rantai pasok, distribusi, dan pemasaran hasil pertanian. Pembatasan aktivitas ekonomi menyebabkan permintaan terhadap beberapa komoditas menurun sehingga harga jual hasil pertanian mengalami tekanan. Namun, dibandingkan sektor ekonomi lainnya, sektor pertanian tetap mampu bertahan dan menjadi salah satu sektor yang masih tumbuh positif selama masa pandemi. Pada tahun 2021, NTP kembali meningkat menjadi 104,64 seiring dengan pemulihan aktivitas ekonomi nasional dan membaiknya harga komoditas pertanian.

Periode 2022-2023 menunjukkan peningkatan NTP yang sangat signifikan, yaitu dari 109,73 menjadi 112,46, yang merupakan nilai tertinggi selama periode pengamatan. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga komoditas pertanian global akibat gangguan rantai pasok dunia pasca pandemi serta konflik geopolitik internasional yang menyebabkan kenaikan harga pangan. Di sisi lain, permintaan terhadap produk pertanian tetap tinggi sehingga pendapatan petani meningkat lebih cepat dibandingkan pengeluaran yang mereka tanggung. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan petani Indonesia secara umum mengalami perbaikan pada akhir periode penelitian, karena NTP yang semakin tinggi mencerminkan meningkatnya kemampuan petani dalam memenuhi kebutuhan konsumsi dan biaya produksi usahatani.



Sumber: *Badan Pusat Statistik*

Gambar 1.4 Upah Buruh Tani (Rupiah)

Berdasarkan data periode 2008-2023, terlihat bahwa upah buruh tani secara umum mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Upah buruh tani merupakan salah satu indikator penting yang dapat memengaruhi keputusan masyarakat untuk bekerja di sektor pertanian dan pada akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia. Menurut Belmondo & Triani (2020), Kenaikan upah dapat menjadi indikator bagi sektor ekonomi dalam melakukan permintaan terhadap tenaga kerja. Sehingga naiknya tingkat upah menyebabkan kenaikan harga barang dan jasa yang mengakibatkan biaya hidup menjadi semakin tinggi.

Pada tahun 2008, upah buruh tani tercatat sebesar Rp18.721 per hari, kemudian meningkat cukup tajam menjadi Rp30.473 per hari pada tahun 2009. Kenaikan ini terjadi seiring dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang relatif stabil setelah krisis global 2008 serta meningkatnya kebutuhan tenaga kerja di

sektor pertanian. Selain itu, kenaikan harga kebutuhan pokok mendorong penyesuaian tingkat upah agar daya beli pekerja tetap terjaga.

Pada periode 2010-2013, upah buruh tani mengalami sedikit penurunan dari Rp29.585 per hari pada tahun 2010 menjadi Rp27.502 per hari pada tahun 2013. Kondisi ini dapat dikaitkan dengan melimpahnya pasokan tenaga kerja di sektor pertanian, terutama di daerah pedesaan, sehingga posisi tawar buruh tani relatif rendah. Di sisi lain, produktivitas pertanian yang belum meningkat secara signifikan menyebabkan kemampuan petani dalam membayar tenaga kerja juga masih terbatas. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan pekerja pertanian belum berjalan secara optimal pada periode tersebut.

Perubahan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014 ketika upah buruh tani meningkat menjadi Rp39.091 per hari. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya inflasi akibat penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang berdampak pada naiknya biaya hidup masyarakat. Untuk mempertahankan daya beli pekerja, terjadi penyesuaian upah di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Selain itu, meningkatnya kebutuhan tenaga kerja pada musim tanam dan panen di beberapa daerah turut mendorong kenaikan upah harian buruh tani.

Pada periode 2015-2019, upah buruh tani relatif stabil pada kisaran Rp37.408 hingga Rp38.231 per hari. Stabilitas ini menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja pertanian berada dalam kondisi yang cukup seimbang antara permintaan dan penawaran tenaga kerja. Pada saat yang sama, pemerintah terus mendorong pembangunan sektor pertanian melalui berbagai program bantuan sarana produksi, pembangunan infrastruktur irigasi, dan peningkatan akses

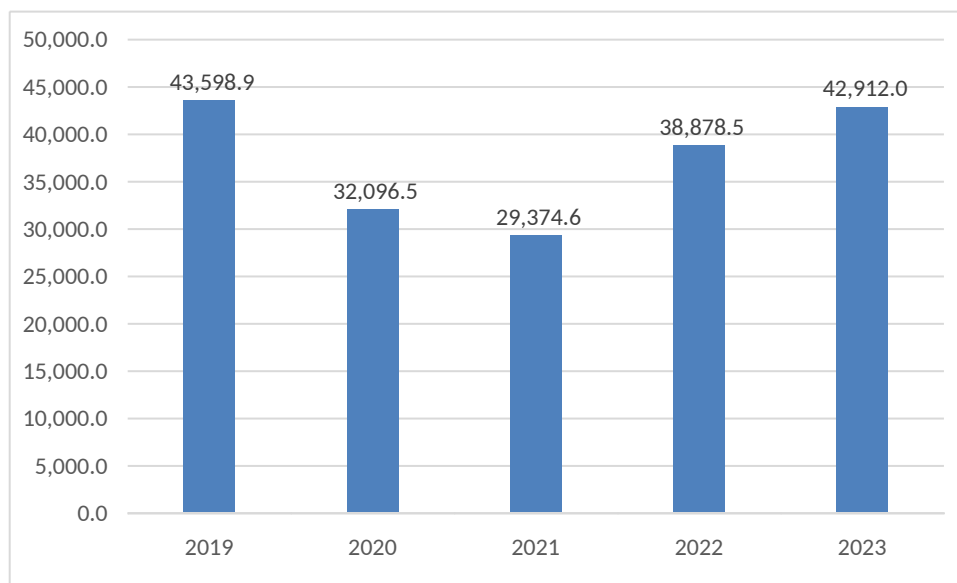
teknologi pertanian. Meskipun demikian, kenaikan produktivitas yang terjadi belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan upah secara signifikan karena sebagian besar usaha tani di Indonesia masih didominasi oleh petani skala kecil.

Pada tahun 2020, upah buruh tani meningkat tajam menjadi Rp52.466 per hari. Kenaikan ini terjadi pada masa pandemi COVID-19 yang menyebabkan perubahan kondisi pasar tenaga kerja nasional. Banyak sektor ekonomi mengalami perlambatan dan terjadi perpindahan tenaga kerja antar sektor. Di beberapa wilayah, keterbatasan mobilitas pekerja menyebabkan pasokan tenaga kerja pertanian berkurang sehingga upah buruh tani mengalami peningkatan. Selain itu, sektor pertanian menjadi salah satu sektor yang tetap beroperasi selama pandemi sehingga kebutuhan tenaga kerja tetap terjaga.

Pada tahun 2021, upah buruh tani kembali meningkat menjadi Rp52.595 per hari dan kemudian sedikit menurun menjadi Rp51.898 per hari pada tahun 2022. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh proses pemulihan ekonomi nasional pascapandemi. Meningkatnya aktivitas ekonomi di sektor industri dan jasa menyebabkan sebagian tenaga kerja kembali berpindah dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian. Kondisi ini memengaruhi dinamika permintaan dan penawaran tenaga kerja pertanian, meskipun secara umum tingkat upah masih berada pada level yang lebih tinggi dibandingkan periode sebelum pandemi.

Pada tahun 2023, upah buruh tani tercatat sebesar Rp51.203 per hari. Jika dibandingkan dengan tahun 2008, upah buruh tani telah meningkat hampir tiga kali lipat selama periode pengamatan. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan pekerja pertanian, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan

seperti inflasi, kenaikan biaya hidup, keterbatasan produktivitas, dan alih tenaga kerja ke sektor nonpertanian. Secara keseluruhan, perkembangan upah buruh tani tahun 2008-2023 mencerminkan adanya perubahan kondisi ekonomi nasional, transformasi struktur ketenagakerjaan, serta berbagai kebijakan pemerintah yang memengaruhi tingkat pendapatan tenaga kerja di sektor pertanian.



Sumber: *Badan Koordinasi Penanaman Modal*

Gambar 1.5 Investasi Sektor Pertanian (Miliar Rupiah)

Berdasarkan data periode 2008-2023, terlihat bahwa investasi sektor pertanian menunjukkan tren yang cenderung meningkat meskipun mengalami beberapa fluktuasi. Menurut Adha & Andiny (2022), Kegiatan investasi memungkinkan suatu masyarakat terus menerus meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. Pada tahun 2008, nilai investasi sektor pertanian masih relatif rendah, yaitu sebesar Rp1.234 triliun. Kemudian pada tahun 2009 meningkat menjadi Rp2.597 triliun dan terus naik hingga mencapai Rp8.883,8 miliar pada

tahun 2010. Peningkatan ini menunjukkan mulai tumbuhnya minat investor terhadap sektor pertanian seiring dengan meningkatnya kebutuhan pangan nasional dan membaiknya kondisi ekonomi Indonesia setelah dampak krisis keuangan global tahun 2008.

Pada periode 2011-2012, investasi sektor pertanian terus meningkat dari Rp9.614 triliun menjadi Rp9.728 triliun. Kenaikan tersebut didorong oleh berbagai kebijakan pemerintah yang mulai menempatkan sektor pertanian sebagai sektor strategis dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Selain itu, meningkatnya permintaan domestik terhadap komoditas pangan dan perkebunan memberikan prospek keuntungan yang lebih baik bagi pelaku usaha dan investor. Kondisi ini mendorong masuknya modal untuk pengembangan perkebunan, peternakan, serta industri pengolahan hasil pertanian.

Namun, pada tahun 2013 investasi sektor pertanian mengalami penurunan menjadi Rp6.949 triliun. Penurunan ini dipengaruhi oleh ketidakpastian ekonomi global yang terjadi akibat perlambatan ekonomi dunia dan gejolak pasar keuangan internasional. Selain itu, pelemahan nilai tukar rupiah pada periode tersebut menyebabkan investor cenderung lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya. Meskipun demikian, sektor pertanian tetap menjadi salah satu sektor yang memiliki daya tahan cukup baik karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat.

Pada periode 2014-2017, investasi sektor pertanian kembali menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Nilainya meningkat dari Rp13.357 triliun pada tahun 2014 menjadi Rp22.883 triliun pada tahun 2017. Kenaikan ini sejalan dengan

berbagai program pembangunan pertanian yang dijalankan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur irigasi, rehabilitasi jaringan pengairan, mekanisasi pertanian, serta pemberian berbagai insentif untuk menarik investasi. Selain itu, komitmen pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan turut meningkatkan kepercayaan investor terhadap prospek sektor pertanian Indonesia.

Peningkatan investasi semakin terlihat pada tahun 2018 dan 2019, yaitu dari Rp31.186 triliun menjadi Rp43.598 triliun. Periode ini ditandai dengan meningkatnya investasi pada subsektor perkebunan, hortikultura, peternakan, dan industri pengolahan hasil pertanian. Pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil serta meningkatnya permintaan ekspor beberapa komoditas unggulan seperti kelapa sawit, kopi, dan kakao turut menjadi faktor pendorong masuknya investasi dalam jumlah besar. Tahun 2019 menjadi salah satu tahun dengan nilai investasi tertinggi sebelum terjadinya pandemi COVID-19.

Pada tahun 2020 dan 2021, investasi sektor pertanian mengalami penurunan menjadi Rp32.096 triliun dan Rp29.374 triliun. Penurunan ini tidak terlepas dari dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu aktivitas ekonomi global dan domestik. Ketidakpastian ekonomi menyebabkan banyak investor menunda ekspansi usaha maupun realisasi investasi baru. Selain itu, gangguan rantai pasok, pembatasan mobilitas, serta perlambatan aktivitas perdagangan internasional turut memengaruhi arus investasi di berbagai sektor, termasuk sektor pertanian. Meskipun demikian, dibandingkan sektor lainnya, sektor pertanian tetap menunjukkan ketahanan yang cukup baik selama masa pandemi karena berperan sebagai penyedia kebutuhan pangan masyarakat.

Setelah pandemi mulai terkendali, investasi sektor pertanian kembali meningkat menjadi Rp38.878 triliun pada tahun 2022 dan mencapai Rp42.912 triliun pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan pulihnya kepercayaan investor terhadap sektor pertanian seiring dengan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, meningkatnya perhatian pemerintah terhadap ketahanan pangan, pengembangan food estate, hilirisasi produk pertanian, serta pemanfaatan teknologi pertanian modern menjadi faktor yang mendorong peningkatan investasi.

Secara keseluruhan, perkembangan investasi sektor pertanian selama tahun 2008-2023 menunjukkan tren yang positif, di mana nilai investasi meningkat lebih dari tiga puluh kali lipat dibandingkan awal periode pengamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian semakin dipandang sebagai sektor yang memiliki prospek strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan ketahanan pangan nasional.

Berdasarkan fenomena tersebut, menarik untuk dikaji lebih dalam bagaimana pengaruh luas lahan pertanian, nilai tukar petani, upah buruh tani, dan investasi sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia. Pemahaman terhadap hubungan antara variabel-variabel ini sangat penting dalam merumuskan kebijakan ekonomi sektor pertanian yang mendorong pertumbuhan berkelanjutan. Kajian ini semakin relevan mengingat Indonesia terus berupaya mencapai pertumbuhan ekonomi sektor pertanian yang inklusif dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan untuk mengarahkan pertanian Indonesia menuju efisiensi, inklusivitas, dan keberlanjutan yang lebih besar melalui

peningkatan produktivitas, perlindungan lahan pertanian, dan investasi yang adil di seluruh wilayah. Dengan demikian, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Luas Lahan Pertanian, Nilai Tukar Petani, Upah Buruh Tani, dan Investasi Sektor Pertanian terhadap Penyerapan Tenaga Kerja Sektor Pertanian di Indonesia Tahun 2008-2023.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaruh luas lahan pertanian, nilai tukar petani, upah buruh tani, dan investasi sektor pertanian secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia tahun 2008-2023?
2. Bagaimana pengaruh luas lahan pertanian, nilai tukar petani, upah buruh tani, dan investasi sektor pertanian secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia tahun 2008-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh luas lahan pertanian, nilai tukar petani, upah buruh tani, dan investasi sektor pertanian secara parsial terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia tahun 2008-2023.

2. Untuk mengetahui pengaruh luas lahan pertanian, nilai tukar petani, upah buruh tani, dan investasi sektor pertanian secara bersama-sama terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia tahun 2008-2023.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis penelitian ini akan menjelaskan tentang luas lahan pertanian, nilai tukar petani, upah buruh tani, dan investasi sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia. Di samping itu, penulis juga berharap penelitian ini dapat menjadi referensi untuk penulis sejenis tentang pengaruh luas lahan pertanian, nilai tukar petani, upah buruh tani, dan investasi sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan terkait pengaruh luas lahan pertanian, nilai tukar petani, upah buruh tani, dan investasi sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia. Semoga pengetahuan yang didapat ini bisa diterapkan dan dilaksanakan oleh penulis dengan baik;
2. Pihak lain, pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai pengaruh luas lahan pertanian, nilai tukar petani, upah buruh tani, dan investasi sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia kepada yang berkepentingan baik dalam penelitian selanjutnya atau sebagai bahan ajar;

3. Pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh luas lahan pertanian, nilai tukar petani, upah buruh tani, dan investasi sektor pertanian terhadap penyerapan tenaga kerja sektor pertanian di Indonesia, sehingga informasi tersebut dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan bagi pemerintah untuk menentukan keputusan pembuatan kebijakan.
4. Universitas Siliwangi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan bacaan, referensi, dan juga bahan masukan serta perbandingan yang dapat digunakan baik untuk penelitian-penelitian selanjutnya maupun untuk bahan ajar.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini yaitu di Indonesia dengan menggunakan data sekunder yang setiap variabelnya diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, dan *World Bank* serta beberapa sumber media online yang relevan dan terpercaya.

1.5.2 Waktu Penelitian

Penelitian dilaksanakan terhitung mulai dari bulan Oktober 2025 sampai dengan Juni 2026, dengan waktu penelitian.

